

PEMETAAN PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA (SUATU ANALISIS KEKUATAN, KESENJANGAN, PELUANG DAN TANTANGAN)

Oleh:

La Ode Safiun Arihi

Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHO

Email: safiun@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kondisi riil Sekolah, Guru, Siswa sarana dan prasarana, 2) Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara, dan 3) Kebutuhan mendasar dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara? Permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah adalah (1) jumlah dan rasio pendidik dan tenaga kependidikan yang belum mencapai angka ideal, (2) kualitas guru yang rendah, (3) Pembayaran tunjangan profesi guru yang sering terlambat (5) banyak sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kebutuhan mendasar penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah adalah (1) penambahan jumlah guru, (2) terdistribusinya jumlah guru yang memenuhi angka rasio ideal di setiap wilayah, (3) kegiatan yang mampu meningkatkan kompetensi guru, (4) pembayaran tunjangan profesi guru tepat waktu dan (5) pembenahan keadaan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Permasalahan pendidikan*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendapatkan bangsa yang cerdas, salah satunya ditempuh melalui pendidikan. Sebagai faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya dituntut bermutu, tetapi juga harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara memiliki kecakapan hidup (*life skills*) dan lebih berperan dalam pelaksanaan pembangunan.

Layanan pendidikan bermutu merupakan hak setiap orang, sebagaimana diakui pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat (1)). Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya pendidikan bermutu tersebut (Pasal 11).

Secara nasional, pemerintah mengakui bahwa salah satu masalah pendidikan adalah

rendahnya mutu. Meskipun dalam berbagai kompetisi dan olimpiade internasional peserta dari Indonesia telah berhasil mengukir prestasi dengan meraih sejumlah medali emas, perak, dan perunggu sebagai salah satu indikator mutu yang tinggi, namun secara umum mutu pendidikan Indonesia masih termasuk rendah dibanding dengan negara lain. Pada level ASEAN saja, mutu pendidikan Indonesia lebih rendah bila dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari hasil studi PISA (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2006 dalam TIMSS (*Trends in International Mathematic and Science Study*). Berdasarkan hasil studi PISA tersebut, diketahui bahwa skor tes siswa Indonesia pada aspek literasi, numerasi, dan sains berada pada posisi nomor 50 dari 54 negara (Kemendiknas, 2010: 48-49).

Selain itu, rendahnya mutu pendidikan nasional Indonesia juga dapat dilihat dari skor IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau Human Development Index (HDI) yang dilaporkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Pada tahun 2012, skor IPM Indonesia berada pada posisi 111 dari 182 negara, berada di bawah IPM negara-negara ASEAN seperti Singapura (18), Brunei (30), Malaysia (64), dan Thailand (87) (UNDP, Maret 2013).

Untuk meningkatkan skor IPM, pemerintah terus menunjukkan komitmennya meningkatkan mutu

SDM. Dari 11 prioritas nasional dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, pendidikan ditetapkan sebagai prioritas kedua untuk dilaksanakan, setelah bidang reformasi birokrasi dan tata kelola. Prioritas pendidikan mencakup kegiatan peningkatan akses pendidikan berupa pemberian dana BOS, penyelesaian rehabilitasi sekolah, pemberian tunjangan guru, serta dukungan pendanaan kepada perguruan tinggi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (RKP 2014). Untuk melaksanakan program prioritas di bidang pendidikan tersebut, pemerintah menyediakan dana pendidikan sebesar Rp 368,89 triliun pada APBN 2014, atau sebesar 20 % dari total belanja negara sebesar Rp 1.842,49 triliun (UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014). Dari total anggaran pendidikan tersebut, sebesar Rp 80,66 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendorong peningkatan akses pendidikan, terutama peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Demikian pula, salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan di suatu daerah provinsi adalah skor IPM. Sebab, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) adalah salah satu pembentuk IPM, selain indeks standar hidup layak dan indeks harapan hidup (UNDP, 2012). Pada tahun 2011, skor IPM Sultra sebesar 70,55 (BPS, 2012). IPM Sultra kalah bersaing dengan provinsi lain, karena hanya berada pada nomor urut 25 dari 33 provinsi dan berada di bawah skor rata-rata nasional (72,77). Skor tersebut lebih rendah dari skor IPM seluruh provinsi di Jawa dan Sumatera. Bahkan IPM Sultra lebih rendah dari IPM Sulawesi Utara (76,54), Sulawesi Selatan (72,14), dan Sulawesi Tengah (71,62). Kita hanya sedikit lebih baik dari Sulawesi Barat (70,11), Kalimantan Selatan (70,44), NTB (66,23), NTT (67,75), Maluku Utara (69,74) dan Papua (65,36). Data ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Sultra masih tergolong rendah dan harus terus ditingkatkan.

Menyadari akan pentingnya pendidikan dalam mendorong IPM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadikan pengembangan mutu sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu program prioritas pembangunan

daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra 2008-2013. Program ini antara lain dilaksanakan melalui peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang (SD hingga Perguruan Tinggi). Tujuannya tentu untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, yakni hak untuk memperoleh akses dan layanan pendidikan yang murah dan bermutu. Untuk melaksanakan program pendidikan tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan anggaran sebesar Rp 113,38 miliar dalam APBD Provinsi Sultra 2013.

Skor IPM juga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menggambarkan mutu pendidikan di daerah kabupaten/kota di Sultra, khususnya Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan skor IPM yang dicapai pemerintah kabupaten/kota di Sultra, terkonfirmasi bahwa mutu pendidikan Kabupaten Konawe Utara cukup memprihatinkan. Sampai dengan tahun 2011, skor IPM Kabupaten Konawe Utara hanya sebesar 68,86 (BPS, 2012). Selain berada di bawah skor rata-rata IPM Sultra (70,55), IPM Kabupaten Konawe Utara juga termasuk dalam kategori rendah. Sebagai pembandingan, IPM Kota Kendari mencapai 76,07; Kota Bau-Bau 74,10; Kolaka 71,46; Konawe 70,42; Muna 67,95; Buton Utara 69,24; Kolaka 71,46; Konawe 69,80; Bombana 67,85; Wakatobi 68,04; Kolaka Utara 69,33; Buton 69,34. Jadi, IPM Kabupaten Konawe Utara hanya sedikit lebih baik dari Kabupaten Bombana.

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu kerja keras dan terobosan progresif untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Maka, berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan IPM harus diambil, salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan masalah pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan pemetaan ini sangat penting, karena hasilnya akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Konawe Utara dalam menyusun kebijakan pendidikan, program prioritas, dan alokasi anggaran pendidikan yang lebih tepat sasaran, sehingga penyelenggaraan pendidikan lebih baik dan mutu pendidikan pun dapat meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kondisi riil Sekolah, Guru dan Siswa di Kabupaten

Konawe Utara., 2) Kondisi riil sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara, 3) Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Konawe Utara, 4) Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara, dan 5) Kebutuhan mendasar dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data dilakukan dalam empat cara, yakni Wawancara, FGD, Studi/ Kajian Dokumen Kebijakan Pendidikan, dan Survey. Informan penelitian ini adalah *stakeholders* pendidikan di Kabupaten Konawe Utara. Mereka berasal dari unsur Dinas Pendidikan, Bappeda (Bidang Sosial Budaya), DPRD (Komisi Pendidikan), Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, PGRI, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, LSM yang bergerak di bidang pendidikan, dan Media Massa.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer bersumber dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan FGD (*Focused Group Discussion*). Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen kebijakan nasional dan pemerintah daerah yang terkait dengan persoalan pendidikan.

Data primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis SWOT ditambah dengan analisis Kesenjangan. Dalam melakukan analisis, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1) Membuat transkrip data hasil wawancara, 2) Membuat kategorisasi data/informasi dari hasil transkrip, yaitu mengelompokkan informasi/isu/pendapat dalam dua kategori, yaitu yang sama dan yang berbeda, 3) Melengkapi data/informasi dalam setiap kategori berdasarkan hasil kajian dokumen kebijakan dan data-data kuantitatif, 4) Mendiskripsikan dan membuat interpretasi terhadap data/informasi hasil penelitian dan 5) Membuat kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi riil Sekolah, Guru, dan Siswa

Sebaran data mengenai jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa menurut kecamatan di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3. Untuk guru SD, jumlah paling banyak terdapat di Kecamatan Lasolo, yakni sebanyak 158 Guru, yang selaras dengan jumlah keseluruhan siswa di Kecamatan tersebut, yakni sebanyak 1979 orang. Sedangkan jumlah guru yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sawa yang hanya memiliki 52 orang Guru dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 603 orang.

Tabel 1. Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SD di Kabupaten Konawe Utara Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Siswa	Rasio Guru-Siswa
1	Motui	7	60	612	10.20
2	Sawa	7	52	603	11.60
3	Lembo	8	55	781	14.20
4	Lasolo	18	158	1979	12.53
5	Molawe	9	84	1054	12.55
6	Andowia	8	84	939	11.18
7	Asera	13	104	1049	10.09
8	Oheo	8	53	606	11.43
9	Langkikima	7	55	687	12.49
10	Wiwirano	17	125	1171	9.37
JUMLAH		102	830	9481	11.42

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara

Jumlah SMP di Kabupaten Konawe Utara saat ini sebanyak 30 sekolah, baik sekolah dengan status negeri maupun sekolah dengan status swasta. Jumlah siswa keseluruhan mencapai 3.589 orang dengan jumlah guru sebanyak 394 orang.

Kecamatan Lasolo menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah sekolah yang paling banyak, yakni sebanyak 5 sekolah, sedangkan Kecamatan Andowia menjadi Kecamatan dengan jumlah sekolah yang paling sedikit, yakni hanya 1 sekolah saja.

Jumlah sekolah tersebut memiliki linearitas yang tinggi dengan jumlah guru dan siswanya, Kecamatan Lasolo memiliki 75 orang guru dan 607

orang siswa sedangkan kecamatan Andowia hanya memiliki 25 orang guru saja dengan dengan jumlah siswa sebanyak 375 orang.

Tabel 2. Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMP di Kabupaten Konawe Utara Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Siswa	Rasio Guru-Siswa
1	Motui	3	33	216	6.55
2	Sawa	2	40	225	5.63
3	Lembo	2	26	273	10.50
4	Lasolo	5	75	607	8.09
5	Molawe	3	48	426	8.88
6	Andowia	1	25	375	15
7	Asera	4	48	442	9.21
8	Oheo	3	26	304	11.69
9	Langkikima	3	35	245	7
10	Wiwirano	4	38	476	12.53
JUMLAH		30	394	3589	9.11

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara

Pada tingkat SMA, Kabupaten Konawe Utara saat ini baru memiliki total 14 sekolah baik SMA yang berstatus sekolah Negeri maupun sekolah yang berstatus sekolah Swasta (Lihat Tabel 3). Dari 10 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara, seluruh Kecamatan telah memiliki SMA, dimana Lasolo dan Langkikima menjadi Kecamatan dengan jumlah sekolah yang paling

banyak yakni dengan masing-masing 3 sekolah. Selanjutnya adalah Kecamatan Andowia, Kecamatan Asera dan Kecamatan Wiwirano dengan masing-masing 2 sekolah, serta 5 Kecamatan lainnya dengan masing-masing 1 sekolah, yakni Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Molawe serta Kecamatan Oheo.

Tabel 3. Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMA di Kabupaten Konawe Utara Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Guru	Siswa	Rasio Guru-Siswa
1	Motui	1	23	148	6.43
2	Sawa	1	29	231	7.97
3	Lembo	1	20	204	10.2
4	Lasolo	3	52	697	13.4
5	Molawe	1	17	218	12.82
6	Andowia	2	10	37	3.7
7	Asera	2	49	657	13.41
8	Oheo	1	15	202	13.47
9	Langkikima	3	17	198	11.65
10	Wiwirano	2	21	412	19.62
JUMLAH		17	253	3004	11.87

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara

Kondisi riil Sarana dan Prasarana

Data mengenai jumlah laboratorium komputer di sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan data pada tabel tersebut, jumlah laboratorium komputer yang ada di sekolah

di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah hanya sebanyak 5 ruang perpustakaan saja.

Pada jenjang pendidikan SD, tidak terdapat laboratorium komputer diseluruh sekolah, untuk jenjang pendidikan SMP jumlah laboratorium komputer adalah sebanyak 5 ruang perpustakaan saja,

dan tidak terdapat sama sekali laboratorium komputer pada jenjang pendidikan SMA.

Tabel 4. Keadaan Laboratorium Komputer Di Kabupaten Konawe Utara Menurut Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	LABORATORIUM KOMPUTER			Σ
		SD	SMP	SMA	
1	Motui	0	0	0	0
2	Sawa	0	1	0	1
3	Lembo	0	0	0	0
4	Lasolo	0	2	0	2
5	Molawe	0	0	0	0
6	Andowia	0	0	0	0
7	Asera	0	2	0	2
8	Oheo	0	0	0	0
9	Langkikima	0	0	0	0
10	Wiwirano	0	0	0	0

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara

Data mengenai jumlah Ruang Perpustakaan di sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan data pada tabel tersebut, jumlah Ruang Perpustakaan yang ada di sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sebanyak 41 ruang perpustakaan.

Pada jenjang pendidikan SD, tidak terdapat ruang perpustakaan diseluruh sekolah, untuk jenjang pendidikan SMP jumlah ruang perpustakaan adalah sebanyak 28 ruang perpustakaan, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA jumlah ruang perpustakaan adalah sebanyak 13 ruang perpustakaan.

Tabel 5. Keadaan Ruang Perpustakaan Di Kabupaten Konawe Utara Menurut Kecamatan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	RUANG PERPUSTAKAAN			Σ
		SD	SMP	SMA	
1	Motui	0	4	1	5
2	Sawa	0	3	1	4
3	Lembo	0	2	1	3
4	Lasolo	0	3	2	5
5	Molawe	0	2	1	3
6	Andowia	0	1	1	2
7	Asera	0	4	2	6
8	Oheo	0	3	1	4
9	Langkikima	0	3	2	5
10	Wiwirano	0	3	1	4

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara

Permasalahan pokok pengelolaan pendidikan dasar dan menengah

1. Kompetensi akademik guru rendah

Salah satu persoalan serius yang terjadi pada pendidikan di Kabupaten Konawe Utara adalah kompetensi akademik guru rendah. Pengukuran mengenai hal tersebut

mengacu pada banyaknya guru di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang tidak lulus pada saat mengikuti ujian kompetensi guru (UKG). Akan tetapi, persoalan tersebut merupakan persoalan yang berlaku secara nasional, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Syahwal Gultom, bahwa kualitas guru di Indoensia saat ini masih rendah. Banyaknya guru terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak lulus uji kompetensi dan sertifikasi, juga sebagai akibat rendahnya kualitas mereka. Selain itu, buruknya hasil ujian nasional pada beberapa provinsi juga dianggap sebagai salah satu indikator rendahnya kualitas guru. Dilihat dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51% yang berpendidikan S1 atau lebih, sisanya (49%) belum berpendidikan S1. Begitu pula dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70% yang memenuhi syarat. Sedangkan sisanya (30%) belum memenuhi syarat. Selain jenjang pendidikan yang belum memadai, kompetensi guru juga masih bermasalah. Saat dilakukan tes terhadap guru semua bidang studi, rata-rata tak sampai 50% soal yang bisa dikerjakan (Antara News, 27 September 2013).

2. Distribusi pendidik yang tidak merata

Wilayah Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengalami persoalan distribusi guru, khususnya guru pendidikan dasar belum merata. Ada sekolah yang kelebihan guru, dan ada sekolah yang kekurangan guru. Kasi Pembinaan Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Ahmad mengatakan, terjadi penumpukan guru di ibukota kabupaten/kota dalam lingkup Sulawesi Tenggara. Sementara sekolah yang terletak di pedalaman atau daerah khusus kekurangan guru, utamanya yang berstatus PNS (Kendari Pos, Juli 2014). Informasi ini memberikan gambaran bahwa penyebaran guru di Sulawesi Tenggara perlu dibenahi, agar efektivitas penyelenggaraan pendidikan di setiap kabupaten/kota berjalan dengan baik.

3. Pembayaran tunjangan sertifikasi yang sering tertunda

Dari sejumlah guru yang sempat diwawancarai, diperoleh informasi bahwa pembayaran tunjangan profesi seringkali kadang terlambat dibayarkan. Alasannya macam-macam. Namun demikian, kasus keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Konawe Utara, tetapi juga sudah menjadi kasus nasional, khususnya di semua kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini bisa diatasi dengan cara memperbaiki mekanisme atau sistem pengeluaran keuangan negara. Sebab, informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru lebih disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat. Sementara, Pemerintah pusat juga berkilah bahwa penyebab keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru karena data guru bermasalah.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia akan berdampak secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan baik dalam aspek proses maupun hasilnya. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan paling jelas pada jenjang pendidikan dasar, tidak adanya laboratorium computer serta ruang perpustakaan menjadi faktor penentu yang mampu menggambarkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut.

Untuk jenjang pendidikan menengah, keberadaan fasilitas sarana dan prasaranapun masih dalam kategori yang kekurangan, masih terdapat sekolah yang tidak memiliki fasilitas ruang perpustakaan atau laboratorium komputer, bahkan keduanya.

Kebutuhan mendasar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah

1. Penambahan jumlah pendidik dan tenaga pendidik

Upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Konawe Utara dapat dimulai dengan menambah jumlah personil guru di Kabupaten Konawe Utara. Untuk Sekolah Dasar (SD), Kabupaten Konawe Utara memiliki jumlah guru sebanyak 1.051 orang dengan jumlah peserta didik sebanyak 16.450 orang atau dengan rasio rata-rata antara siswa dan guru sebanyak 1:15, Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Konawe Utara memiliki jumlah guru sebanyak 524 orang dengan jumlah siswa sebanyak 6.128 orang atau dengan rasio 1:11, sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Konawe Utara baru memiliki jumlah guru sebanyak 83 orang dengan jumlah siswa sebanyak 1.008 atau dengan rasio 1:12.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17, dijelaskan bahwa rasio ideal antara guru dan siswa di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA adalah 1:20, sehingga dengan kondisi yang ada, Kabupaten Konawe Utara masih jauh dari kategori ideal kepemilikan jumlah personil guru jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang ada. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu untuk mulai mengurangi deficit jumlah guru yang ada dengan memaksimalkan quota penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) untuk formasi guru kelas dan juga guru bidang studi yang masih kurang.

2. Manajemen distribusi guru professional (DGP)

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam distribusi guru di Kabupaten Konawe Utara. Data menunjukkan bahwa terdapat distribusi yang tidak berimbang antara jumlah guru yang berada di wilayah perkotaan dengan jumlah guru yang berada di wilayah terpencil. Melihat kenyataan

seperti itu, Kabupaten Konawe Utara melalui Dinas Pendidikan membutuhkan sebuah program manajemen yang mampu untuk membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara desa dan kota dan akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil, salah satu program manajemen yang perlu untuk diterapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara yaitu dengan program Distribusi Guru PNS Proporsional (GDP).

3. Perbaikan sarana dan prasarana

Hal mendasar yang berikutnya perlu untuk dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan sangat sulit diwujudkan di Kabupaten Konawe Utara jika hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada saat ini, padahal Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas, peserta didik akan lebih terbantu dalam mengikuti proses pembelajaran serta menerima materi yang diajarkan, sedangkan bagi pihak guru, mereka akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana yang ada guna mewujudkan kegiatan pembelajaran yang lebih variatif, menarik dan bermakna bagi para peserta didik.

SIMPULAN

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Konawe Utara adalah (1) terkait pada jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum mencapai angka ideal, serta manajemen pendistribusian

yang belum proporsional di setiap Kecamatan berdasarkan rasio antara jumlah sekolah dan guru, serta rasio antara jumlah guru dengan jumlah murid yang ada. (2) Persoalan kualitas guru yang rendah, (3) Pembayaran tunjangan profesi guru yang sering terlambat dan, masalah pendidikan yang harus menjadi *concern* pemerintah daerah adalah (4) banyaknya sarana dan prasarana yang tidak memadai serta mengalami kerusakan baik itu sehingga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan serta pencapaian tujuan pendidikan.

Kebutuhan mendasar pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah adalah (1) penambahan jumlah guru di Kabupaten Konawe Utara agar mencapai rasio ideal antara guru dan sekolah serta guru dan murid, (2) sistem manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menjamin terdistribusinya jumlah guru yang memenuhi angka rasio ideal di setiap Kecamatan yang ada, (3) kegiatan yang mampu meningkatkan kompetensi guru, (4) manajemen yang menjamin dibayarkannya tunjangan profesi guru tepat waktu dan (5) pembenahan keadaan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan serta melengkapinya dengan berbagai macam fasilitas yang mampu melancarkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, serta meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti proses pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Sofan, 2013, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah dalam Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arcaro, Jerome S, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terjemahan Yosa Iriantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2012*, Kendari.
- Danim, Sudarwan, 2011, *Pengantar Kependidikan: Landasan, Teori, dan*
- 234 *Metafora Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas, 2010, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*.
- Djaali, 2011, *Implementasi Standar Nasional Pendidikan*, Makalah Ilmiah yang Disampaikan Pada Seminar Nasional “Telaah Kritis Pelaksanaan Pendidikan Nasional, yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Pascasarjana UNJ, di Jakarta, 5 April 2011.
- Faturrahman, dkk, 2012, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hamalik, Oemar, 2006, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Kerjasama Sekolah Pascasarjana UPI dengan Remaja Rosdakarya.
- _____, 2012, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rosada, Dede, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Sekretariat Negara, 2012, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013*.
- Tilaar, H.A.R, 2004, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tirtarahardja, Umar dan Sulo, 2005, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Kerjasama Pusat Perbukuan Depdiknas dengan Rineka Cipta